

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2023-2024  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- : 9  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023  
Waktu : 14.10 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Membahas:  
1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2022;  
2. RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;  
3. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; dan  
4. Isu-isu aktual lainnya.  
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didamping oleh Budhy Setiawan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)  
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 31 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal);  
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Inspektur Jenderal);  
5. Dr. Hanif Faishol, S.Hut., MP. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Tata Lingkungan);  
6. Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Agr.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);

7. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan);
8. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari);
9. Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan);
10. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun);
11. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
12. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Drs. Ade Palguna Ruteka (Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM);
14. Ir. Ary Sudijanto, M.S.E. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
15. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
16. Natalis Anis Harjanto (Kuasa Direktur Utama/Direktur Operasi Perum Perhutani);
17. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I);  
dan
18. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani V).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2022, RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024, Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan Isu-isu aktual lainnya, dibuka pukul 14.10 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/ F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:**

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022 per-31 Desember 2022 sesuai Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Realisasi Pendapatan Negara bersih berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp6.587.227.384.305,00 (enam triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta

tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima rupiah atau mencapai 119% dari estimasi Pendapatan - LRA sebesar Rp5.545.928.460.000,00 (lima triliun lima ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

- b. Realisasi Belanja Negara bersih sebesar Rp6.348.098.998.211,00 (enam triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sebelas rupiah) atau mencapai 98% dari alokasi anggaran sebesar Rp6.505.258.688.000,00 (enam triliun lima ratus lima miliar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA Tahun 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, sebesar Rp7.648.615.254.000,00 (tujuh triliun enam ratus empat puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas lebih mendalam bersama Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Rancangan Tematik Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Komisi IV DPR RI mendukung tambahan dan kesempatan mendapatkan anggaran tambahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dengan sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kehutanan merujuk PNBP Kementerian Lingkungan dan Kehutanan mencapai realisasi 119%.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan upaya serius untuk meningkatkan kepatuhan para pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dalam memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil tindakan tegas kepada pemegang PPKH yang tidak melaksanakan kewajibannya, mulai dari pembekuan sampai dengan pencabutan PPKH.

6. Komisi IV DPR RI sangat prihatin atas rendahnya kualitas udara akibat pencemaran yang terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), dan sekitarnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat melakukan koordinasi dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah luar biasa dalam rangka mencegah dan mengendalikan terjadinya pencemaran udara.
7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi untuk penambahan formasi pegawai serta peningkatan kesejahteraan dan perlengkapan kerja semua pegawai yang bertugas di garda terdepan pengamanan hutan, seperti Polisi Hutan, Manggala Agni, dan Penyuluh Kehutanan.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai batas akhir penyerahan Proposal Program Berbasis Masyarakat, seperti Bang Pesona, Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan bantuan lainnya di setiap Eselon I teknis, paling lambat tanggal 30 September 2023. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat untuk melakukan pendalaman atas hal dimaksud, khususnya mengenai capaian realisasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang masih di bawah 60% untuk direalokasi kepada program/kegiatan lainnya.
9. Komisi IV DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja Komisi IV DPR RI untuk membahas kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di seluruh Indonesia.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan,

Ttd.

**Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**

A-151